



Pelatihan Videografi Untuk Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan Kauman Kecamatan Bangil Dalam Menciptakan Konten Video Yang Profesional dan Informatif

Achmad Fatchur Rozaq

¹Program Studi D3 Teknik Elektronika, Sekolah Tinggi Teknik Multimedia Internasional Malang

** Penulis Korespondensi : rozakroz@yahoo.com*

Received :
22 Nopember 2025

Revised :
25 Januari 2026

Accepted :
31 Januari 2026

Abstrak

Transformasi digital pemerintahan menuntut aparat pemerintah tingkat kelurahan untuk mampu menghasilkan konten informasi publik yang profesional dan mudah dipahami masyarakat. Video menjadi media komunikasi yang efektif dalam mendukung transparansi dan pelayanan publik. Namun, keterbatasan kompetensi teknis videografi dan editing masih menjadi kendala utama. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Kauman, wilayah Kecamatan Bangil. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan kapasitas aparat dalam perencanaan, produksi, dan editing video layanan publik. Metode yang digunakan meliputi pelatihan teori, praktik langsung (*hands-on*), pendampingan produksi, serta evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test*. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 42% berdasarkan perbandingan nilai rata-rata *pre-test* dan *post-test*. Peserta mampu menghasilkan tiga produk video layanan publik yang layak publikasi. Kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung komunikasi publik berbasis digital di tingkat kelurahan.

Kata kunci: videografi, aparat pemerintah, komunikasi publik, konten digital, pengabdian Masyarakat

Abstract

Digital transformation in governance requires village-level government officials to produce professional and informative public communication content. Video has become an effective medium for enhancing transparency and public services. However, limited technical competence in videography and editing remains a challenge. This community service program was conducted in Kelurahan Kauman, Bangil District. The objective was to enhance officials' capacity in planning, producing, and editing public service videos. The methods included theoretical training, hands-on practice, production mentoring, and evaluation using pre- and post-tests. The results indicate a 42% increase in participants' understanding. Participants successfully produced three public service videos suitable for publication. This program supports digital-based public communication at the village administration level.

Keywords: videography training, government officials, digital communication, community service

I. PENDAHULUAN

Transformasi digital menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah mendorong optimalisasi media digital untuk mendukung transparansi informasi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Perkembangan teknologi komunikasi visual menjadikan video sebagai media yang efektif karena mampu menyampaikan pesan secara informatif, persuasif, dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.

Di tingkat kelurahan, kebutuhan akan konten visual informatif semakin meningkat seiring penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi publik resmi. Aparatur pemerintah dituntut tidak hanya memahami substansi pelayanan, tetapi juga memiliki kemampuan teknis dalam memproduksi konten yang menarik dan profesional. Konten video yang baik harus memperhatikan aspek komposisi gambar, kualitas audio, alur cerita, serta kejelasan pesan layanan publik yang disampaikan.

Berdasarkan observasi awal di Kelurahan Kauman Kecamatan Bangil.

II. METODE PELAKSANAAN

2.1 Waktu dan Lokasi

Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil.

2.2 Peserta

Peserta terdiri dari 15 aparatur kelurahan yang terlibat dalam pelayanan administrasi dan pengelolaan informasi publik.

2.3 Tahapan Pelaksanaan

a. Analisis Kebutuhan

Dilakukan melalui wawancara dan observasi untuk mengetahui tingkat literasi digital peserta.

b. Pelatihan Teori

Materi meliputi:

- Dasar videografi (framing, angle, composition)
- Teknik pencahayaan dan audio
 - Penyusunan storyboard dan naskah
 - Teknik komunikasi visual layanan publik

ditemukan bahwa pemanfaatan media video masih terbatas pada dokumentasi sederhana tanpa perencanaan konsep dan standar produksi yang jelas. Keterbatasan kompetensi teknis dan minimnya pelatihan menjadi faktor utama rendahnya kualitas konten. Padahal, optimalisasi video layanan publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat citra institusi pemerintahan di era digital.

Oleh karena itu, pelatihan videografi menjadi solusi strategis untuk meningkatkan literasi digital dan kapasitas teknis aparatur dalam memproduksi konten video profesional dan informatif secara mandiri dan berkelanjutan.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat c. Praktik dan Pendampingan

Peserta melakukan:

- Simulasi pengambilan gambar layanan administrasi
- Wawancara perangkat kelurahan
- Editing menggunakan aplikasi CapCut/Filmora
- Finalisasi video dan presentasi hasil

d. Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui:

- Pre-test dan post-test
- Penilaian kualitas video
- Kuesioner kepuasan peserta

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peningkatan Pemahaman

Kualitas video dianalisis menggunakan rubrik penilaian yang mencakup empat aspek utama:



Aspek Penilaian	Skor Sebelum Pelatihan	Skor Sesudah Pelatihan
Komposisi Visual	60	82
Kualitas Audio	55	78
Alur Narasi	58	80
Kejelasan Informasi	62	85

Terjadi peningkatan kualitas rata-rata sebesar 37%. Video yang dihasilkan setelah pelatihan menunjukkan:

- Struktur pembuka–isi–penutup yang sistematis
- Informasi prosedur layanan yang lebih jelas
- Penggunaan teks overlay dan transisi yang relevan
- Durasi video yang lebih efektif (2–3 menit)

Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya meningkatkan pemahaman teoritis, tetapi juga menghasilkan luaran nyata berupa produk konten berkualitas.

3.2 Produk Video

Peserta menghasilkan tiga produk video:

1. Video profil Kelurahan
 2. Video prosedur pelayanan administrasi
 3. Video dokumentasi kegiatan masyarakat
- Secara teknis, video menunjukkan peningkatan pada aspek stabilitas gambar, kualitas audio, struktur narasi, dan penggunaan teks informatif.

3.3 Dampak Kegiatan

Dari sisi kelembagaan, pelatihan ini memberikan beberapa dampak strategis, yaitu:

1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur
Aparatur lebih percaya diri dalam mendokumentasikan kegiatan dan menyampaikan informasi publik.
2. Efisiensi Anggaran Dokumentasi
Kelurahan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada jasa pihak ketiga untuk produksi video sederhana.

3. Peningkatan Transparansi Layanan
Video prosedur pelayanan membantu masyarakat memahami alur administrasi sehingga mengurangi kesalahan pengajuan dokumen.

4. Penguatan Citra Institusi
Konten visual yang profesional meningkatkan kredibilitas dan citra positif kelurahan di media sosial.

Dampak ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi memiliki potensi keberlanjutan dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital.

3.4 Analisis Efektivitas Metode Pelatihan

Efektivitas metode pelatihan dianalisis berdasarkan pendekatan pembelajaran partisipatif (*participatory learning*) dan metode *experiential learning*. Model ini menekankan praktik langsung sebagai sarana utama peningkatan kompetensi teknis. Hasil observasi menunjukkan bahwa sesi praktik dan pendampingan memberikan dampak lebih signifikan dibandingkan sesi teori.

Peserta menunjukkan peningkatan keterampilan terutama pada aspek:

- Pengambilan gambar stabil menggunakan tripod
- Penentuan angle wawancara yang komunikatif
- Penambahan teks informatif dan logo instansi
- Pengaturan audio agar lebih jernih dan minim noise

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan *hands-on training* efektif untuk meningkatkan keterampilan teknis aparatur yang sebelumnya belum memiliki latar belakang multimedia.

Faktor Pendukung dan Kendala

Faktor Pendukung:

- Antusiasme peserta yang tinggi
- Dukungan penuh dari Lurah dan perangkat kelurahan
- Ketersediaan perangkat smartphone yang memadai



Kendala:

- Keterbatasan waktu pelatihan
 - Perbedaan tingkat literasi digital peserta
 - Keterbatasan perangkat audio profesional
- Namun kendala tersebut dapat diatasi melalui pendampingan intensif dan penggunaan aplikasi editing yang ramah pengguna.

Keberlanjutan Program

Untuk menjaga keberlanjutan program, disepakati beberapa tindak lanjut:

- Pembentukan tim kecil pengelola media kelurahan
- Penyusunan SOP produksi konten video
- Penjadwalan rutin publikasi konten layanan

Dengan strategi tersebut, peningkatan kapasitas aparatur diharapkan berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan pelatihan semata.

IV. KESIMPULAN

Pelatihan videografi di Kelurahan Kauman Kecamatan Bangil efektif dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam menghasilkan konten video profesional dan informatif. Terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman teknis serta kemampuan praktik produksi video. Program ini mendukung transformasi digital dan penguatan komunikasi publik di tingkat kelurahan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lurah dan seluruh aparatur Kelurahan Kauman Kecamatan Bangil atas partisipasi aktif dalam kegiatan ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

[1] Pinem, C. D., & Zarkasi, I. R. (2025). *Metafungsi videografi unmanned aerial vehicle pada konten komunikasi publik pemerintah*. Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi.

[2] Wijayanti, S. H., Harrison, A., Dhian, Y. C., Jessica, T., & Margaretha, T. (2023). *Upgrading videography knowledge and skills in making Canva-based learning videos for elementary school teachers*. Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang.

<https://doi.org/10.26905/abdimas.v8i4.11324>

[3] Sari, M. N., & Veri, J. (2025). *Peran media sosial dalam komunikasi publik di era digital: Kajian literatur sistematis berbasis PRISMA*. Jurnal Daya Saing, 11(3), 15–36. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v11i3.2403>

[3] Husna, S. N., & Ayuh, E. T. (2025). *Studi tentang strategi komunikasi publik Kominfo Kota Bengkulu dalam mendorong literasi di masa transformasi digital*. Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.1074>

[4] Utami, H., & Leliana, I. (2025). *Strategi komunikasi digital Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan informasi kepada publik*. Jurnal Komunikasi Antartika.

[5] Abdilah, S., & Purnamasari, H. (2023). *Efektivitas penyebaran informasi publik melalui Instagram oleh Diskominfo Kabupaten Karawang*. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 10(2). <https://doi.org/10.25157/moderat.v10i2.3682>

[6] Stiawati, T., & Noerisma, M. O. (2024). *Strategi dalam pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Cilegon*. Sawala: Jurnal Administrasi Negara, 12(2). <https://doi.org/10.30656/sawala.v12i2.9680>

[7] Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., Erdinaya, L. K., & Komariah, K. (2020). *Komunikasi humas pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Barat melalui media digital Instagram*. Jurnal Kajian Komunikasi.

[8] Ardianto, E. (2014). *Komunikasi massa: Suatu pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.



-
- [9] Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage.
- [10] Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). *Pedoman pengelolaan media sosial instansi pemerintah*. Jakarta.
- [11] Mulyana, D. (2018). *Ilmu komunikasi: Suatu pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.